

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya (Azzumar, 2009).

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional (Arsyad, 1997).

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pembangunan nasional kearah yang lebih baik. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang No. 32 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001.

Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan daerah secara optimal yang akan digunakan dalam membiayai kebutuhan daerah dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan menciptakan persaingan yang sehat antar daerah ,serta mendorong timbulnya inovasi.

Adapun sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Sasana, 2006).

Selaras dengan inti desentralisasi fiskal, maka besarnya sumber pendanaan untuk daerah tersebut juga dibarengi dengan kebebasan yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Dengan demikian, diharapkan agar belanja pemerintah daerah (*local government spending*) akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat (Bati, 2009)

Belanja modal sebagai bentuk perubahan yang cukup fundamental di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mulai dilakukan pasca reformasi dengan didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama UU No. 22/1999, UU No. 25/1999, PP No. 105/2000, dan PP No. 108/2000 (Halim, 2002). Sebelumnya di dalam APBD, pengalokasian untuk jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan. Layaknya belanja pembangunan, belanja

modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan aset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penggunaan belanja modal yang tepat sasaran diharapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang diukur dengan indikator produk domestik regional bruto (PDRB) yang pada akhirnya juga akan dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu Negara (Iskandar, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 1994). Diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diduga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004)

Selama dilaksankannya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDB atas harga konstan tahun 2000. Menurut data yang diperoleh, terlihat bahwa nilai PDB atas harga konstan tahun 2000 mengalami pertumbuhan, yaitu dari Rp 2.178.850,40 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 2.314.458,80 miliar pada tahun 2010. Berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen. (*Bps, 2009-2010*)

Pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Seperti halnya Indonesia, kondisi pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat selama

diberlakukannya kebijakan Desentralisasi Fiskal juga mengalami peningkatan. Menurut data yang diperoleh, menunjukkan bahwa nilai PDRB atas harga konstan tercatat sebesar Rp 36.683,24 miliar pada tahun 2009 dan nilainya meningkat sebesar 38.862,14 miliar pada tahun 2010. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 5,94 persen. *(Bps. Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009-2010)*

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2009 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 535,41 miliar dan nilainya meningkat menjadi 582,58 miliar pada tahun 2010, berarti mengalami pertumbuhan sebesar 8,81 persen dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. *(Bps. Statistik Keuangan Kab/Kota Tahun 2009-2010)*

Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam periode yang sama, realisasi pengeluaran untuk belanja modal, juga mengalami peningkatan. yaitu nilainya pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 1,648.02 miliar dan meningkat sebesar Rp 1,869.21 miliar pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja modal mengalami pertumbuhan sebesar 13,42 persen. *(Bps. Statistik Keuangan Kab/Kota Tahun 2009-2010)*

Dari pemikiran dan latar belakang masalah yang diuraikan diatas ,apakah benar pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2003-2012 ?
2. Bagaimanakah pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2003-2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2003-2012.
2. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2003-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris atas dampak pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.
2. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan desentralisasi fiskal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

3. Terakhir, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan pembatasan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Penulis akan membahas dan menganalisa perkembangan dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Analisa dan pembahsan kontribusi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
3. Analisa diatas dilakukan dengan menggunakan data panel sejak tahun 2003 sampai tahun 2012.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literatur, yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu penulisan. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti serta hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Yang diantaranya adalah definisi operasional dan

variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data sampai dengan teknik analisis data dan analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Berisikan gambaran umum (deskripsi objek penelitian yang diperoleh), pembahasan masalah dan implikasi kebijakan.

BAB V: PENEMUAN EMPIRIS

Merupakan bab yang memperlihatkan hasil penelitian

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan saran-saran mendukung yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat), penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah.

Selain itu, agar secara empiris dapat dihubungkan dengan hasil-hasil penelitian sejenis atau yang memiliki topik yang hampir sama, maka dilengkapi juga dengan beberapa